

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini semakin banyak tuntutan yang tidak dapat dihindari khususnya tuntutan dalam kemajuan ekonomi. Tuntutan dalam era globalisasi ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, karena dalam memajukan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan swasta ataupun investor asing akan tetapi, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi di suatu negara. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan tingkat kemajuan ekonomi yang signifikan. Semua aktivitas yang terjadi didalam sebuah instansi pemerintahan menjadi perhatian penting terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangan didalamnya.

Setiap kegiatan pengelolaan keuangan pasti memerlukan sistem akuntansi didalamnya bukan hanya perusahaan saja akan tetapi, pemerintah juga memiliki sistem akuntansinya sendiri. Tujuan penggunaan sistem akuntansi pemerintahan berbeda dengan perusahaan pada umumnya, karena Instansi Pemerintahan disini tidak menggunakan sistem akuntansi untuk memperhitungan keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan tetapi, sistem akuntansi didalam sebuah Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi pengatur dan pengendali seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi didalam Instansi Pemerintahan diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman salah satu alat sistem akuntansi yang digunakan juga akan semakin canggih. Tidak hanya untuk perusahaan asing atau swasta namun juga untuk sektor pemerintahan. Dalam era ini sistem akuntansi sudah maju dengan sangat pesat salah satu yang sering ditemui yaitu sistem akuntansi berbasis aplikasi ataupun web yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bantuan internet. Sebagai suatu upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dimasa kini semua proses pengelolaan keuangan,

pencairan dana, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, penyimpanan dan pencatatan atas pengelolaan keuangan negara sudah tidak lagi dilakukan secara manual akan tetapi dalam era ini semua sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis aplikasi.

Menurut Hapsari and Rachmawati (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam mewujudkan *Good Governance* pemanfaatan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu konsep yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas disuatu Instansi Pemerintah memang sudah semestinya dilakukan. Pemerintah dituntut harus bisa mewujudkan tata kelola yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan negara (Wibowo, 2018). Dengan adanya sistem akuntansi berbasis aplikasi yang semakin canggih dalam era ini akan mempermudah pengelola anggaran di pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 berbunyi bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan juga tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Dalam era digital seperti sekarang ini teknologi informasi yang canggih dapat mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh setiap instansi khususnya di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan dalam mengelola pengeluaran kas sebagai komponen sumber daya yang sangat penting. Sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara, pengeluaran kas harus dikelola sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong kemajuan ekonomi dengan tidak melupakan aturan aturan yang berlaku. Pengeluaran kas merupakan serangkaian pengelolaan aktivitas pengeluaran berupa uang tunai maupun cek yang digunakan untuk kegiatan perusahaan (Hutahaean and Winata 2020).

Menurut Pasuhuk, Kalangi, and Warongan (2018) dalam penggunaannya pengeluaran kas negara memiliki mekanisme dan sistem terdiri dari 4 sistem yaitu uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GUP), tambahan uang persediaan (TUP), dan pembayaran langsung (LS). Setiap mekanisme dan sistem yang dipakai dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pengeluaran kas digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional didalam lingkup satuan kerja yang sifatnya situasional. Pada beberapa kegiatan, seperti kegiatan dalam pengadaan barang/jasa yang memerlukan pengeluaran kas yang cukup besar diperlukan keselarasan rencana pencairan dana. Hal ini dilakukan agar setiap pengeluaran kas khususnya pengeluaran kas dengan jumlah besar diperlukan perencanaan yang matang serta menjadwalkan pengeluaran untuk menjamin tingkat akurasi dalam pengeluaran kas negara.

Setiap pengeluaran kas yang terjadi akan berpengaruh pada proses penyerapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) disetiap Instansi Pemerintah. Penyerapan anggaran sendiri berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta dapat meratakan pendapatan (Rachim, 2015). Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Lestari, Bagia, and Jana (2018) Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara sehingga terjadi keseimbangan yang dinamis. Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) merupakan salah satu bentuk wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan berpedoman pada undang-undang. Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan suatu Instansi Pemerintah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara Lestari, Bagia, and Jana (2018). Dalam hal ini penyerapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dikatakan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan suatu negara.

Menurut Delia, *et al* (2021) dalam penelitiannya, penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia dan juga komitmen dari organisasi itu sendiri. Dalam kata lain untuk memaksimalkan

penyerapan anggaran dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Dengan dibutuhkannya sumber daya manusia serta adanya mekanisme dan sistem pengeluaran kas, diperlukan seorang bendahara guna membantu pengelolaan keuangan negara disetiap satuan kerja yang ada di Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 yang disebut bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Bendahara pengeluaran bertugas untuk mengelola keuangan negara terutama dalam hal pengeluaran kas yang menjadi poin penting dalam penyerapan anggaran, karena seringkali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam waktu yang singkat. Dalam prosesnya bendahara pengeluaran akan melakukan pencairan sejumlah uang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diajukan. Akan tetapi dalam proses pengelolaan keuangan negara tidak cukup sampai dipengeluaran kas saja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pengeluaran uang kas negara dibutuhkan dokumen atau surat pertanggungjawaban yang nantinya akan digunakan sebagai bukti transaksi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Menurut Kusumawardani (2020) bendahara pengeluaran wajib melakukan penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Rachim, 2015)

Laporan pertanggungjawaban bendahara akan diminta setiap bulan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara atas uang kas negara yang dikelolanya dan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat – lambatya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Rachim, 2015). Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, bendahara harus membuatnya berdasarkan bukti

dan pembukuan yang telah dilakukan dengan melampirkan buku kas umum, bukti bukti pengeluaran yang sah, bukti penyetoran pajak ke kas negara serta surat pertanggungjawaban (SPJ) bendahara.

Sejak tahun 2002 Kementerian Keuangan telah membentuk penataan organisasi yang meliputi pemisahan, penggabungan, penajaman fungsi, serta modernisasi. Diadakanya pemisahan dan penajaman fungsi diharapkan dapat menciptakan struktur organisasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan, modernisasi diimplementasikan dalam pembentukan kantor-kantor pelayanan yang modern. Dalam mewujudkan modernisasi, di tahun 2015 Kementerian Keuangan resmi meluncurkan salah satu sistem akuntansi berbasis aplikasi yang dibuat khusus sebagai alat bantu bendahara pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang disebut Sistem Aplikasi Satker (SAS). Sistem Aplikasi Satker (SAS) merupakan salah satu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang digunakan dalam sektor pemerintahan salah satunya di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Proses pengelolaan kas negara serta pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara membutuhkan informasi dan data yang akurat. Sebagai salah satu sistem aplikasi yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan negara, Sistem Aplikasi Satker (SAS) sendiri diharapkan dapat membantu segala proses pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak serta meminimalisir terjadinya kesalahan data dan kecurangan. Sayangnya, menurut Laksana, Subroto, and Baridwan (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan Sistem Aplikasi Satker tidak berpengaruh terhadap kepuasan para penggunanya, hal disebabkan karena penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) merupakan sebuah kewajiban sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur kepuasan para penggunanya. Selain itu, dibutuhkan server induk dan data backup untuk penggunaan di perangkat lain.

Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi Kementerian keuangan mengadopsi *Integrated Financial Management Information System* (IFMS) sebagai salah satu bentuk *e-Government* dalam bidang keuangan negara. Salah satu bentuk implementasi dari *Integrated Financial Management Information System* (IFMS) adalah dengan melakukan penyempurnaan suatu

aplikasi yang terintegrasi yang dinamanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (Prabowo, 2017)

Sampai dengan tahun 2018, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) masih dalam proses persiapan dengan melakukan tahapan uji coba (*piloting*). Setelah 3 tahun melewati uji coba dan sosialisasi, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) resmi diputuskan untuk digunakan disetiap satuan kerja yang ada di Instansi Pemerintah tepatnya di Tahun 2022 termasuk di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Dengan munculnya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), maka aplikasi yang ada di satuan kerja akan mengalami perubahan yang signifikan. Terlebih Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini didesain untuk dapat berintegrasi dari beberapa aplikasi sebelumnya. Menurut Wibowo (2018) dengan adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beberapa aplikasi yang sebelumnya telah dirilis oleh Kementerian Keuangan akan dilebur. Aplikasi RKA-KL untuk penganggaran, Aplikasi SIMAK BMN untuk penatausahaan asset, Aplikasi SILABI untuk pelaporan serta Aplikasi SAS untuk melakukan pencairan dana akan dilebur dan digabungkan kedalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Menurut Harnowo, Santoso, and Suryani (2021) keberadaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai pengganti sistem aplikasi yang sudah ada akan menuntut manajemen untuk membuat strategi baru karena perlunya adaptasi dengan pola baru dalam penyelesaian pekerjaan. Karena sebagai sebuah sistem baru, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memiliki resiko kegagalan dalam penerapannya. Sebagai sebuah sistem baru dalam pengelolaan kas negara, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) akan menghadirkan berbagai ragam tantangan dalam penggunaannya. Menurut Wibowo (2018) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini akan menggantikan dan menyatukan beberapa aplikasi yang sudah ada dan berdiri masing masing sehingga perlu adanya upaya-upaya sistematis agar sistem ini dapat berjalan dengan baik di Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Perpindahan dari beberapa sistem aplikasi yang dipakai di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak khususnya Sistem Aplikasi Satker

(SAS) ke sebuah sistem terintegrasi yang disebut Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pastinya memiliki kendala tersendiri, khususnya di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak. Meskipun dinilai lebih sederhana karena merupakan sistem yang terintegrasi tetapi, tidak menutup kemungkinan akan adanya kegagalan serta kendala-kendala dalam masa peralihan dari beberapa sistem aplikasi ke Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Karena merupakan sistem yang baru, penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri dalam pengelolaan keuangan negara jika dibandingkan dengan sistem sistem aplikasi lainnya yang sudah terlebih dahulu dipakai di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Dari latar belakang diatas diuraikan bahwa bagaimana pentingnya sebuah sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara terlebih dengan adanya pergantian sebuah sistem baru di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Terintegrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dari penggunaan aplikasi SAKTI sebagai suatu aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Kerja Deputy Perlindungan Khusus Anak?
2. Bagaimana Efektivitas dari adanya penggunaan aplikasi SAKTI untuk membantu bendahara dalam pengelolaan keuangan negara serta membuat laporan pertanggungjawaban di lingkup Satuan Kerja Deputy Perlindungan Khusus Anak?
3. Kendala apa yang mungkin ada dalam masa peralihan beberapa aplikasi kedalam aplikasi SAKTI di lingkup Satuan Kerja Deputy Perlindungan Khusus Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan aplikasi SAKTI sebagai suatu aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkup Satuan Kerja Deputi Perlindungan Khusus Anak.
2. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi SAKTI dalam membantu Bendahara mengelola keuangan negara serta membuat laporan pertanggungjawaban di lingkup Satuan Kerja Deputi Perlindungan Khusus Anak.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi selama masa peralihan beberapa aplikasi kedalam aplikasi SAKTI di lingkup Satuan Kerja Deputi Perlindungan Khusus Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat diterima baik untuk peneliti sendiri maupun untuk Satuan Kerja di Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang baru tentang penggunaan sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara. Serta wawasan terkait adanya sistem aplikasi terintegrasi di sektor pemerintahan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi dalam pembuatan jurnal atau skripsi. Serta menambah wawasan pembaca tentang penggunaan sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Bagi Satuan Kerja di Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi para pengguna sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan masukan dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan di sektor Pemerintahan.